

## **BAB II**

### **KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Mural Sebagai Media Kritik Sosial Politik**

Mural menjadi salah satu media dalam penyampaian aspirasi, khususnya yang berisikan kritik sosial. Kegelisahan, kekecewaan, dan amarah yang dituangkan oleh para pengkritik yang dituangkan di dalam mural. Penggunaan mural sebagai media penyampaian aspirasi dapat terjadi karena tidak berjalannya sistem penyampaian aspirasi formal dipemerintah dengan baik. Kondisi ini lah yang membuat masyarakat mencari media lain untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara mengekspos ke publik baik itu melalui media online maupun offline termasuk mural.

Karya mural di ruang-ruang publik sebenarnya bukan hal yang baru di Negara ini. Mural sudah ada sejak lama, karya seni ini sering dipakai untuk mempercantik tampilan dinding atau permukaan luas yang bersifat permanen. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dalam laman Mural Form bahwa mural adalah karya seni yang dilukis di dinding. Seni mural umumnya dibuat ke dalam ukuran yang besar dan berada di tempat umum. Karya seni yang membutuhkan keahlian dalam artistic tinggi ini telah ada sejak 30.000 Sebelum Masehi (SM). Lukisan yang disebut mural ini pertama di dunia ditemukan di sebuah dinding gua di Chauvet, Prancis (Fauzan.2021).

Lukisan di dinding terus bermunculan hingga di zaman Paleolitik atas seperti yang di temukan di Mesir pada 3150 SM, di Pompeii pada 100 SM hingga 79 SM dan Milan pada 1700-1600 Sm. Karya mural ini dapat menjadi media untuk menyampaikan kritik, sosial, bahkan sampai pada ideologi tertentu. Pada tahun 1837, Pablo Picasso menciptakan lukisan dengan judul Guernica. Lukisan tersebut menceritakan tentang perang sipil di spanyol. Namun, gaya lukisannya diceritakan dengan “jenaka” sehingga memiliki kesan

satire. Tak hanya lukisan, mural juga sering menjadi media untuk menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial dan politik yang ada (Rasyad.R.2021)..

Mural sebagai media kritik sosial dan politik dilakukan oleh Diego Rivera di Mexican Muralista. Karya pertama yang ia buat adalah *Man at the Crossroad*. Mural tersebut menggambarkan tentang pekerja yang mengendalikan mesin. Tak hanya itu, mural karya Rivero ini menjadi sebuah kontroversi karena terselip gambar *Vladimir Lenin dan Parade Soviet May Day*.

Selain di Mexico, mural yang mengandung kritik sosial juga berkembang di Indonesia. Salah satunya, yaitu mural dari Yung Surakarta. Seniman yang memiliki nama asli Elham Nur Fatoni merupakan pemuda Surakarta dan telah aktif memproduksi mural sejak tahun 2012. Berbagai karyanya mengandung kritik akan fenomena sosial yang ada dimasyarakat. Salah satu contoh karya dari Young Surakarta berjudul “Ketika Semesta Dalam Satu Genggaman”. Karya tersebut dibuat pada tahun 2016 di salah satu tembok lantai 2, Pasar Kembang, Kota Solo (Rasyad.R.2021).

Tindakan aparat di berbagai kota dalam menghapus sejumlah mural bermuatan kritik terhadap pemerintah membuat perhatian publik Indonesia belum lama ini. Setidaknya pada akhir bulan Agustus sampai pada awal bulan September 2021, tindakan penghapusan mural “kritik” oleh aparat terjadi di sejumlah kota, termasuk di Jakarta, Bandung, Tangerang dan, Banjarmasin. Salah satu contoh mural yang dihapus oleh aparat adalah mural yang bergambarkan mirip Presiden Joko Widodo yang bertulis “404:Not Found”.

Di Amerika Serikat contohnya, ada sebuah peraturan federal yang melindungi karya seni, termasuk mural. Aturan ini bernama VARA atau *Visual Artists Rights Act 1990*. VARA merupakan sebuah aturan yang memastikan bahwa para seniman dapat mengklaim perlindungan terhadap karya seninya. Salah satu contoh kasus terkenal berkat

adanya Vara adalah kemenangan para seniman tembok gedung *5pointz* yang menuntut sebuah pengembangan perumahan mewah di pengadilan pada tahun 2014. *5pointz* sendiri awalnya merupakan sebuah gedung bertingkat yang menjadi tempat berkumpulnya para seniman jalanan di Kota New York, AS (Paskalis.A.S.2021)..

Bahkan, sejumlah orang menyewa tempat tersebut untuk menjadi “studio” buku. Dengan izin sang pemilik tanah, merak menyulap sebuah gedung kosong menjadi bangunan yang temboknya dipenuhi dengan karya Grafiti. Sejak tahu 1990 hingga 2013, telah tercatat 1.500 seniman *Street art* telah membuat karya di dinding-dinding *5pointz*. Namun, pada tahun 2013 ketika sang pemilik bangunan berniat merobohkan gedung tersebut untuk dibangun menjadi apartemen baru, ia mengecat putih semua dinding dalam semalam. Tidak lama kemudia, gedung *5pointz* menuntut pada 2014. Karena itulah, para seniman *5pointz* menggugat pengembangan property yang menangani proyek itu (Paskalis.A.S.2021).

Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan proses demokrasi, kondisi kritis politik nasional yang penuh dengan demokrasi semu yang dapat mengakibatkan ketidak stabilan birokrasi pemerintah. Hal tersebut dapat mengakibatkan konflik eksternal yang terjadi pada masyarakat dalam menentukan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Salah satu langkah nyata guna menjadi solusi adalah dengan melalui mural bagi pembentukan karakteristik budaya politik masyarakat, meraka mendeskripsikan mural dalam mengkonstuksi budaya politik dan mendeskripsikan kekuatan dalam pembentukan *Civil Society* (Adham, 2016).

## **B. Sikap Pemerintah Terhadap Mural**

Mural sebagai lukisan yang telah ada sejak sebelum Masehi, mural juga telah memiliki fungsi untuk mendokumentasikan peradaban. Mural pada zaman kuno juga

telah memuat sejarah kehidupan manusia seperti cara mereka berburu, memperoleh makanan hingga berbagai tradisi yang terekam melalui mural. Memasuki era modern mural berkembang menjadi seni yang lebih kontemporer sebagai sarana menyampaikan ekspresi sosial (Netray's Blog.2021).

Dalam Perspektif aparat pemerintah, mereka beragumen bahwa mural tersebut dihapus lantaran substansinya mengandung unsur provokatif, dimana sifatnya dapat menghasut khalayak luas. Aparat pemerintah tak hanya menghapus mural tersebut, melainkan juga mencari, menangkap, dan membawa ke rana hukum. Belum lagi aspek status legalitas juga dipersoalkan dalam pembuatan mural di ruang publik tersebut.

Mural dapat ditemukan di berbagai tempat dengan gambar dan makna yang beragam. Tak jarang di dalam mural tersebut memuat pesan satire dan tidak diketahui siapa pembuatnya. Salah satu contohnya “Jokowi 404: *Not Found*” yang menjadi salah satu mural yang belakangan ini membuat kehebohan karena dinilai menghina kepala Negara. Padahal bagian mata dalam mural tersebut telah ditutupi oleh pesan 404: *Not Found*”.

Dalam menanggapi hal tersebut mereka yang kontra pun menilai bahwa penghapusan mural tersebut merupakan bentuk dari kematian demokrasi di Indonesia. Masyarakat menilai pemerintah menjadi anti kritik dengan memburu pembuatnya seolah teroris. Padahal mural yang menggambarkan sindiran terhadap elit penguasa kerap dijumpai di berbagai wilayah. Penghapusan mural tersebut dinilai mengganggu para warganet yang menentang akan tindakan pemerintah yang lagi-lagi menunjukkan sikap anti kritik.

Penghapusan mural dan pembuat diburu oleh pihak kepolisian menjadi tindakan yang justru menuai banyak kritik dari warganet. Kritik tersebut salah satunya disampaikan oleh akun @anggasongko yang mengatakan politisi takut sama mural adalah secukupnya politisi dan menurutnya berkesenian adalah setangguh-tangguhnya oposisi. Tak hanya sampai disitu akun @Budisetyarso juga mengingatkan sulitnya berekspresi di masa

ini, mengingat mengkritik melalui meme dapat dijerat ITE, sementara kritik melalui mural juga dapat dihadang KUHP.

Salah seorang warganet bahkan membandingkan hal ini dengan kebebasan berpendapat di Negara lain, yakni contohnya di Amerika Serikat, ketika Donald Trump dijadikan bahan dinding, namun pembuatannya tidak pernah diburu atau dipertanyakan. Karena Amerika Serikat menghormati kebebasan masyarakatnya dalam berekspresi. Menariknya lagi salah satu warganet juga menilai bahwa mural-mural tersebut lebih artistik dibandingkan baliho-baliho papol yang kini mulai ramai menghiasi papan reklame jalanan di berbagai wilayah.

Pada, dasarnya, Negara Indonesia merupakan negara yang berbasis paham demokrasi, tepatnya demokrasi pancasila. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi ke ruang publik, dan dalam melaksanakan hal tersebut tidak dibatasi atau tidak diperlakukan secara represif. Itu artinya masyarakat sah saja dalam menuangkan ekspresi dalam berpendapat.